

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan kondisi di mana seorang atau sekelompok orang yang tidak dapat memenuhi kehidupan dasar mereka untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Kemiskinan adalah masalah sering terjadi negara-negara berkembang seperti negara Indonesia yang akan memperlambat proses pembangunan ekonomi bangsa (Sutikno et al., 2019). Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan seperti Investasi, Upah Minimum, Belanja Pemerintah dan PDRB. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kemiskinan mulai dari investasi yang dapat memberikan lapangan pekerjaan, upah minimum yang layak untuk para pekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dana belanja pemerintah yang dialokasikan dengan baik dan benar guna kebutuhan dan bantuan terhadap masyarakat serta PDRB untuk mengukur tingkat kemiskinan yang ada di wilayah tertentu.

Kemiskinan merupakan masalah global yang harus dapat diselesaikan agar dapat mengurangi berbagai dampak buruk yang akan tercipta seperti meningkatnya tindakan kriminalitas, banyaknya kasus putus sekolah, munculnya berbagai masalah kesehatan di masyarakat dsb. Seluruh manusia memiliki hak untuk memenuhi atau mencukupi kehidupannya sebagaimana kehidupan yang layak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti yang tercantum dalam Al-Quran Qs Az-Dzariyat ayat 19 yang berbunyi :

وَالْمَحْرُومِ لِلسَّائِلِ حَقُّ أَمْوَالِهِمْ وَفِي

“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta” (Quran Qs Az-Dzariyat ayat 19).

Pulau Jawa yang dihuni oleh sekitar 60% dari total populasi masyarakat Indonesia atau sekitar 150 juta penduduk dan memiliki tingkat kemajuan pembangunan yang tertinggi di Indonesia. Pulau Jawa mempunyai angka tertinggi dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, Pulau Jawa merupakan wilayah dengan intensitas yang tertinggi jika dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia dalam sektor perekonomian. SDA yang melimpah, angkatan kerja usia muda yang memiliki pendidikan, memiliki pasar domestik dengan pertumbuhan yang cepat dan luas, serta kondisi sarana dan prasarana yang memadai dan lengkap merupakan keunggulan yang dimiliki oleh Pulau Jawa (Sulistiawan, 2023). Namun masih banyak permasalahan yang harus dibenahi di Pulau Jawa agar kemiskinan Pulau Jawa dapat terus berkurang dari sebelumnya yang masih relatif tinggi.

Tabel 1.1
Pesentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Jawa Tahun 2022

No	Provinsi	Jumlah (Juta Orang)	Persentase (%)
1	Jawa Timur	4.236,51	10,49
2	Jawa Barat	4.053,62	7,98
3	Jawa Tengah	3.858,23	10,98
4	Banten	829,66	6,24
5	DKI Jakarta	494,93	4,61
6	DI Yogyakarta	463,63	11,49

Sumber : Databoks

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada tabel diatas jumlah penduduk miskin Pulau Jawa masih menunjukkan angka yang relatif tinggi. Dengan presentase kemiskinan tertinggi terdapat pada Provinsi DIY dengan presentase 11,49% dan provinsi kedua dengan presentase tertinggi di Pulau Jawa merupakan Provinsi Jawa Tengah 10,98% dengan jumlah angka penduduk miskin 3.858,23 orang.

Pulau Jawa dengan tingkat kemajuan pembangunan paling tinggi dan kegiatan ekonomi yang terkonsentrasi pada wilayah ini masih menunjukkan tingkat kemiskinan yang tinggi. Pulau Jawa menjadi salah satu pulau penyumbang bertambahnya angka kemiskinan yang cukup tinggi dibandingkan dengan pulau lain.

Jawa Tengah berada di bagian tengah pulau jawa yang langsung berbatasan dengan 3 provinsi lainnya yaitu Jawa Timur, Jawa Barat dan DIY. Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terbagi atas 29 kabupaten dan 5 kota, 576 kecamatan, dan 8.559 desa/kelurahan. Provinsi yang memiliki Ibukota Kota Semarang ini memiliki luas wilayah sebesar 32.800,69 km² dan jumlah penduduk sebanyak 34.718.204 jiwa.

Jawa Tengah adalah provinsi yang paling disukai di Indonesia, terutama pulau utama Jawa sebagai sarana informasi karena proses perizinan yang cukup baik daripada provinsi lain. Sektor yang sedang terdampak di Provinsi Jawa Tengah adalah sektor manufaktur dan pariwisata, yang ditopang oleh sektor infrastruktur, properti, agrobisnis dan energi. Hal ini mengakibatkan munculnya proyek-proyek potensial yang sejalan dengan platform Jawa

Tengah Investasi, yang menghadirkan peluang investasi seperti pengembangan bidang Pariwisata Pulau Panjang di Kab. Jepara, Kawasan Wisata Agroedupark Tlogo Wening di Kab. Semarang, industri Perikanan Udang terintegrasi di Kab. Cilacap, dan lain-lain.

Meskipun terdapat potensi yang diunggulkan tidak melepas Provinsi Jawa Tengah dari angka kemiskinan yang masih cukup tinggi. Terutama di Pulau Jawa, Jawa tengah merupakan provinsi kedua yang tingkat kemiskinannya tinggi setelah DIY.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Miskin Jawa Tengah

Kabupaten / Kota	Kemiskinan		
	Jumlah Penduduk Miskin (juta jiwa)		
	2020	2021	2022
PROVINSI JAWA TENGAH	3980.90	4109.75	3831.44

Sumber : BPS Jawa Tengah

Dapat dilihat dari Tabel 1.2 jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah masih cukup tinggi. Penduduk miskin tahun 2022 Jawa Tengah miskin sebanyak 3.8 juta jiwa dengan presentase sebesar 10,98% angka tersebut masih relatif tinggi maka masih perlu ditekan angka kemiskinannya.

Tabel 1.3
Investasi Jawa Tengah 2020-2022

Investasi (Juta Rp)		
2020	2021	2022
1363635.00	1820243.90	33895259.00

Sumber : BPS Jawa Tengah

Berdasarkan Tabel 1.3 daiatas Investasi Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 investasi dari

136363.00 meningkat menjadi 1820243.90 juta tetapi seiring meningkatnya investasi kemiskinan di Jawa Tengah masih tinggi.

Tabel 1.4
Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah 2020-2022

Upah Minimum (Rp)		
2020	2021	2022
1.742.015	1.798.979	1.812.935

Sumber : Jatengprov.go.id

Dapat dilihat dari tabel 1.4 Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya pada tahun 2020 Rp1.742.025 meningkat sebesar 3,27% menjadi Rp1.798.97 namun meningkatnya upah minimum tersebut tergolong masih kecil jika dibandingkan dengan upah minimum Provinsi lain di Indonesia.

Kemiskinan merupakan masalah yang harus dihilangkan agar seluruh masyarakat mendapatkan kehidupan yang layak dan berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada penelitian ini variabel yang digunakan sebagai alat analisis terhadap pengaruh kemiskinan adalah Investasi, Upah Minimum, Belanja Pemerintah dan PDRB. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sutikno et al., 2019) variabel investasi memberikan pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Hasil yang ditunjukkan oleh (Wati, 2015) menunjukkan bahwa Investasi berpengaruh positif dan signifikan pada variabel Kemiskinan. Hasil yang berbeda ditunjukkan dalam (Prasetyawan et al., 2017) yang menunjukkan bahwa variabel investasi memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Sama halnya dengan penelitian yang

dilakukan oleh (Fahrika et al., 2020) yang menunjukkan hasil bahwa variabel Investasi memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap kemiskinan.

Variabel lainnya yang dapat mempengaruhi kemiskinan adalah Upah Minimum dalam penelitian (Ayu, 2018) menunjukkan hasil variabel Upah Minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kusumo, 2019) variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota memberikan hasil positif signifikan terhadap kemiskinan. Hasil yang berbeda pada penelitian (Permana & Esti, 2021) menunjukkan hasil upah minimum negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Dalam penelitian (Rahmat et al., 2021) memberikan hasil variabel Belanja Pemerintah memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan. Hasil yang berbeda pada penelitian (Goni et al., 2022) yang menghasilkan variabel Belanja Pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Selaras dengan hasil yang ditunjukkan oleh (Amalia et al., 2015) bahwa variabel belanja pemerintah memberikan hasil yang negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.

PDRB sebagai salah satu faktor kemiskinan dapat digunakan juga dalam menganalisis pengaruhnya terhadap kemiskinan seperti penelitian yang dilakukan oleh (Giovanni, 2018) yang menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Selaras dengan Penelitian yang dilakukan oleh (Wiguna, 2013) menunjukkan hasil variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan pada penelitian (Bintang &

Woyanti, 2018) variabel PDRB memberikan hasil yang positif signifikan terhadap kemiskinan.

Banyak hal yang dapat mempengaruhi kemiskinan. Kemiskinan harus ditekan bahkan dihilangkan karena setiap orang mempunyai hak untuk memiliki kehidupan yang layak serta berkecukupan. Maka perlu diusulkan penelitian lebih mendalam dengan penelitian berjudul **“Analisis Pengaruh Nilai Investasi, Upah Minimum, Belanja Pemerintah dan PDRB Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus 27 Kabupaten dan 6 kota di Jawa Tengah Tahun 2016-2022)”**. Penelitian ini untuk memahami lebih dalam bagaimana variabel-variabel tersebut mempengaruhi tingkat kemiskinan serta dampak yang akan dihasilkan dari variabel tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka terdapat masalah yang dapat dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh investasi terhadap kemiskinan yang ada di provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh tarif upah minimum terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh belanja pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Tengah?
4. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap kemiskinan yang ada di provinsi Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh investasi terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Tengah pada periode 2016-2022.
2. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap kemiskinan yang ada di provinsi Jawa Tengah pada periode 2016-2022.
3. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kemiskinan provinsi Jawa Tengah pada periode 2016- 2022
4. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Tengah periode 2016-2022

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan, kemudian manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran dan pengaplikasian materi yang telah dipelajari pada saat kuliah, dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh investasi, upah minimum, belanja pemerintah dan PDRB terhadap tingkat kemiskinan yang ada di provinsi Jawa Tengah periode 2016-2022.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan informasi serta referensi untuk pihak yang melakukan studi terkait mengenai pengaruh investasi, upah minimum, belanja pemerintah dan PDRB terhadap tingkat kemiskinan yang ada di provinsi Jawa Tengah periode 2016-2022.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai bahan referensi dan evaluasi dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah terutama dalam menetapkan kebijakan investasi, upah minimum, belanja pemerintah dan PDRB terhadap tingkat kemiskinan yang ada di provinsi Jawa Tengah periode 2016-2022.